



PENERAPAN SISTEM ABSENSI ONLINE TERINTEGRASI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN ASN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU

¹Ferdinandus Jaftoran, ²Agnes Marni Nenoliu, ³Meizar Hidayatul Aqli, ⁴Angel Jevansca Duaramury, ⁵Gevin Wukt Wakim

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara:
Ferdinandusjaftoran07@gmail.com

²Program Studi Administrasi Pemerintahan, Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara:
agnessenoliu@gmail.com

³Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara:
meizaraqli22@gmail.com

⁴Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara
angelduaramury@gmail.com

⁵Program Studi Administrasi Pemerintahan, Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara
gevinwukt04@gmail.com

Received 1 Juni 2023; Revised: 1 November 2023; Accepted: 2 November 2023; Published: November 2023; Available online: November 2023

ABSTRAK

Menurut temuan penelitian, penerapan standar kehadiran berbasis online cukup menguntungkan. mengenai tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan bagaimana kebijakan sistem absensi berbasis online diterapkan. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka, studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah contoh prosedur pengumpulan data. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk menjawab masalah penelitian.

Kata Kunci: implementasi, kebijakan, absensi, berbasis online

PENDAHULUAN

ASN adalah singkatan dari "Aparatur Sipil Negara". Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN menjalankan kebijakan yang

ditetapkan oleh pejabat pemerintah. Sebagai abdi negara, ASN tentunya dibutuhkan untuk beroperasi lebih maksimal lagi di era digitalisasi agar ekspektasi publik terhadap ASN semakin terpenuhi. Revolusi Industri 4.0 telah secara radikal mengubah cara berpikir atau pendekatan pegawai pemerintah terhadap pekerjaan mereka, serta cara mereka beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan

berinteraksi satu sama lain. Namun dengan semakin berkembangnya ke ara digitalisasi membuat kebanyakan ASN hanya fokus pada bagaimana meningkatkan skill tapi lupa untuk tetap menjaga kedisiplinan sebagai seorang ASN, sedangkan sudah jelas ada aturan yang mengatur tentang disiplin pegawai. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab, larangan, dan akibat Pegawai Negeri Sipil jika kewajiban atau larangan tersebut dilanggar. Tata Tertib Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang mengatur tentang Tata Tertib Pegawai Negeri Sipil.

Pada kenyataannya masih banyak ASN yang belum memahami peraturan pemerintah tersebut, yang ditunjukkan dengan ASN yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ASN dengan baik, terbukti dengan pegawai yang tidak disiplin dalam menjalankan pekerjaannya. Kami mencontohkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku khususnya di bidang pengadaan dan informasi kepegawaian yang masih sering dijumpai pegawai yang belum disiplin tentang jam masuk dan keluar kantor yang harus masuk kantor. Oleh sebab itu dengan memanfaatkan pertumbuhan teknologi yang semakin memadai sehingga di terapkanlah program Sistem absensi online terintegrasi dalam meningkatkan ketertiban ASN di Badan Kepegawaian Wilayah provinsi Maluku. Menurut Editor (2019) absensi online merupakan teknologi yang bisa digunakan karyawan dalam melaksanakan absensi tanpa wajib memakai mesin yang berfisik semacam

fingerprint.

Kami akan menyoro ti persoalan disiplin di Bidang Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah yang belum optimal berdasarkan penjelasan di atas. Disiplin pegawai dapat dipengaruhi oleh sistem absensi pegawai yang masih manual, karena kemungkinan kehadiran pegawai tidak sesuai dengan kondisi dan kinerja pegawai yang sebenarnya. Masalah disiplin ini bukanlah masalah baru; sudah ada cukup lama. sehingga, kami mendukung penerapan sistem absensi online yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan disiplin staf di Badan Kepegawaian Daerah

Rumusan Masalah

Berlandaskan deskripsi pada latar belakang, sehingga penulis menjabarkan sebagian rumusan permasalahan yang berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program program Sistem absensi online terintegrasi dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Badan Kepegawaian Daaerah provinsi Maluku?
2. Apa saja kendala- kendala penghambat program Sistem absensi online terintegrasi dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Badan Kepegawaian Daaerah provinsi Maluku?
3. Apa saja upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas program Sistem absensi online terintegrasi dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Badan Kepegawaian Daaerah provinsi Maluku?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian rumusan masalah penulis merumuskan tujuan penelitian untuk menguraikan:

1. Pelaksanaan program Sistem absensi online terintegrasi dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Badan Kepegawaian Daerah provinsi Maluku.
2. Kendala- kendala penghambat penerapan program Sistem absensi online pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Maluku.
3. Upaya- upaya yang di terapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Maluku agar meningkatkan kedisiplinan pegawaisebagai output dari penerapan sistem absensi online.

Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

Hasil penelitian kami diharapkan dapat, memberi kontribusi serta aspirasi pada pengembangan literatur pelayanan public didalam penyelenggaraan pelayanan yang bukan hanya fokus membangun rakyat tapi dimulai dengan membangun kedisiplinan internal para ASN khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Maluku.

Secara Praktis

1. Bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan peran serta dalam rangka perencanaan tindakan, khususnya pengabdian pada rakyat, yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan referensi guna rencana penelitian lain yang bersangkutan dengan pengabdian rakyat di lingkungan pendidikan.
2. Bagi Pemrintah Provinsi Maluku
Hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi aspirasi dan tinjauan agar kedepannya ketika memberi layanan dapat lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas internal maupun eksternal pemerintah.

3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini untuk masyarakat diharapkan bisa. menjadi edukasi, informan, dan panduan yang cukup untuk mendukung masyarakat menanggapi berbagai layanan pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah juga pastinya membutuhkan berbagai aspirasi dan kontribusi masyarakat demi terciptanya layanan pemerintah yang maksimal.

Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberi banyak wawasan kepada peneliti dalam menggelolah dan mencari data sehingga sebagai seorang kader ASN yang akan menjadi bagian dalam penyelenggara Pelayanan Pemerintah agar dapat mengasah diri sendiri bagaimana seharusnya memberi pelayanan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai penulis untuk melakukan penelitian program system absensi online terintegrasi adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada metode dan makna. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah "penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dari apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sejenisnya secara holistik dengan uraian dalam susunan kata-kata

bahasa, dalam konteks alami, serta dengan menggunakan berbagai metode."Kajian ini focus mengamati pada penerapan program system absensi online terintegrasi dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Badan Kepegawaian Daerah provinsi Maluku. Tentang bagaimana para ASN merespon dan menjadikan kedisiplinan sebagai suatu kewajiban yang harus di junjung tinggi agar terciptanya pelayanan yang lebih maksimal.

Teknik Pengumpulan Data

Secara singkat, tata cara pengumpulan data merupakan metode ataupun pendekatan yang digunakan peneliti buat menghimpun data, informasi, serta kebenaran pendukung yang ada buat tujuan penelitian. Peneliti memakai triangulasi sebagai salah satu sistem buat mengeksplorasi serta menjalankan cara pengolahan data kualitatif. Dengan menyamakan hasil wawancara dengan subjek penelitian, tata cara triangulasi bisa dibandingkan dengan alat guna menilai legalitas data. Menurut Sugiyono (2012: 224), tata cara pengumpulan data yaitu prosedur yang setidaknya pada penelitian, karena tujuan mendasar dari penelitian merupakan menghimpun data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai metode:

a. Observasi

"Pengamatan adalah proses yang kompleks, sebuah proses yang tersusun dari berbagai langkah-langkah biologis dan psikologis," tulis Sugiyono (2014:145). Teknik ini diterapkan agar bisa mendapatkan data tentang struktur organisasi serta tugas

pokok setiap ASN yang ada di Badan Kepegawaian Daerah provinsi Maluku.

b. Wawancara

Wawancara yakni pertemuan yang dilakukan oleh dua orang guna bertukar informasi atau sesuatu konsep dengan metode tanya jawab, akibatnya sanggup dikerucutkan jadi semacam kesimpulan atau arti dalam topik khusus Esterberg dalam Sugiyono (2015:72).

Dalam penelitian ini prosedur wawancara langsung yang dilakukan dengan adanya daftar permasalahan yang telah disediakan sebelumnya. Dengan mewawancarai beberapa orang yang sebagai sumber informasi terpercaya berpacu pada jabatan, kedudukan di kantor ataupun pada pengalaman dan prestasi kerja. Informan:

- Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah provinsi Maluku (Nurista A. Khouw.S. Sos., M. AP)
- Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (James T. Leiwakabessy, M.M).

c. Dokumentasi

Sugiyono (2018:476) mendefinisikan dokumentasi sebagai suatu cara pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan foto dalam rangka membuat laporan dan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Teknik ini digunakan untuk menelusuri bukti-bukti yang mendukung dan melengkapi data yang dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara.

d. Sumber Data

Tiga bentuk studi diakui di

area sumber data: studi populasi, studi sampel, dan studi kasus. Tiga bentuk studi diakui di area sumber data: penelitian populasi, penelitian sampel, dan penelitian kasus. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2013:172) yakni: "asal usul data yang ditujukan dalam studi ialah subjek dari mana data bisa dihasilkan." penetapan cara pengumpulan data disamping kategori data yang dibuat dimuka." Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sumber data berasal dari

1. ASN yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.
2. Dokumentasi Kegiatan dan Hal lainnya yang mengenai peristiwa yang terjadi dilapangan yang dipublikasikan untuk menunjang sumber data.

Cara Analisis Data

Tiga bentuk studi diakui di area sumber data: penelitian populasi, penelitian sampel, dan penelitian kasus. metode analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018, hlm. 337) mengemukakan jika sistem metode maupun cara pengolahan data kualitatif sanggup dilakukan dengan 3 tahap, yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/ Verification.

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Informasi) Jumlah informasi yang dikumpulkan di lapangan cukup banyak, dan disajikan dalam format yang tidak sekonsisten data kuantitatif. Akibatnya, dimungkinkan untuk mencoba memadatkan informasi dengan

meringkas, memilah poin-poin penting, serta menolak apa yang tidak penting.

- 2) *Informasi Display* (Penyajian informasi)

Data yang didefinisikan di sini dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk tabel yang diformat dengan rapi, grafik, bagan, piktogram, dan sejenisnya.

- 3) *Conclusion Drawing/ Verification* (Menarik kesimpulan)

Bagi Miles dan Huberman, fase ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Hasil awal yang disajikan hanya bersifat sementara, dan akan direvisi jika ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data putaran berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Provinsi Maluku

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958. Maluku ialah provinsi arkeologi yang terdiri dari rangkaian pulau-pulau kecil 1.392 pulau. Ibukota Ambon ini bersentuhan langsung dengan Laut Seram di utara dan Laut Indonesia serta Laut Arafura di selatan. berada di antara 2 pulau (Irian dan Sulawesi) dan persilangan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Maluku merupakan letak yang strategis di Indonesia timur.

Dari sisi administrasi, Maluku terbagi jadi sembilan kabupaten serta dua kota, dengan total 118 kecamatan dan 1.240 desa dan kelurahan. Menurut data BPS, jumlah penduduk Maluku

Provinsi Maluku adalah “menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas dalam Pelayanan Kepegawaian.”

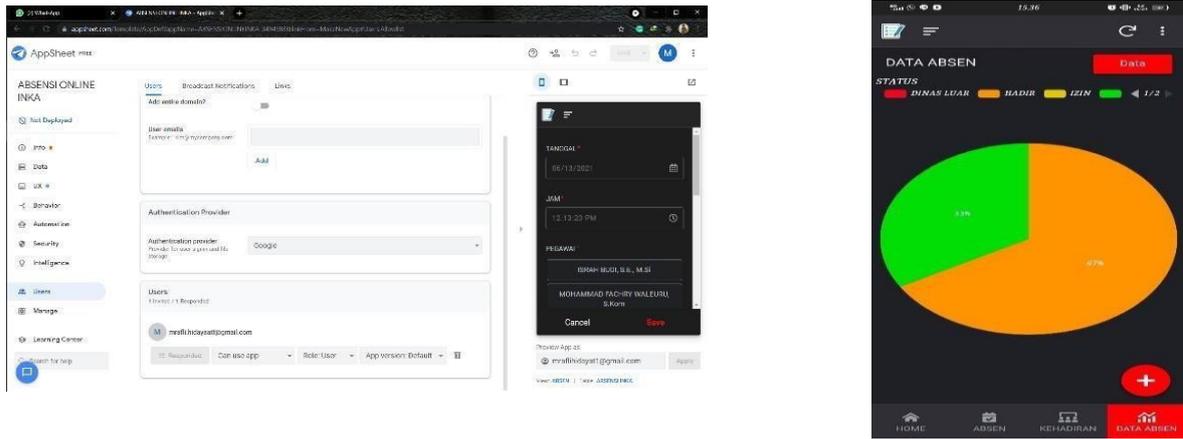
Misi berikut telah ditetapkan untuk membantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

1. Menerapkan pendekatan yang sistematis, efisien, efektif, dan akuntabel di bidang administrasi kepegawaian, perencanaan program, dan pengelolaan keuangan.
 2. Menciptakan proses perencanaan formasi, pengadaan pegawai negeri, dan penggunaan teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
 3. Peningkatan Kualitas Administrasi Transfer, Pemberhentian, dan Pensiun PNS Daerah Secara Sistematis, Tepat Orang, dan Tepat Waktu mewujudkan visinya
- B. Penerapan program Sistem absensi online

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, ada peraturan provinsi. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Maluku Nomor 12 Tahun 2019). Oleh karena itu, BKD provinsi Maluku berupaya untuk menjaga kualitas stafnya. Hal ini terbantu dengan penerapan sistem absensi online. Implementasi menurut Setiawan (2004) adalah evolusi

kegiatan yang mengubah langkah interaksi antara tujuan dan tindakan agar mencapainya, serta diperlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang terorganisir dengan baik. Implementasi memerlukan lebih dari sekedar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan penerapan program sistem absensi online ini sudah cukup berhasil mendisiplinkan para pegawai khususnya yang ada di lingkup BKD provinsi Maluku. Menurut penilaian

beberapa pegawai yang telah kami wawancarai 5 dari 10 orang yang kami wawancarai menyatakan program ini belum berjalan secara optimal salah satu yang masih menjadi faktor penyebabnya adalah kurangnya sanksi yang tegas bagi pegawai yang masih kurang disiplin, mereka berharap program seperti ini seharusnya berjalan bersama dengan sanksinya juga, untuk apa ada aturan jika tidak ada sanksi yang tegas agar dapat memberi efek jera, bukan hanya sekedar penambahan/pengurangan insentif saja. Sehingga penulis menilai masih banyak hal yang perlu di optimalkan, khususnya sadar akan pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor utama penunjang program ini demi terwujudnya penerapan sistem absensi online yang lebih baik lagi kedepannya.



Sumber: Bidang INKA BKD provinsi Maluku.

C. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem absensi online

Kondisi senyatanya di kantor BKD provinsi Maluku jika tidak ada pembaharuan secara berkala infrastruktur tersebut maka akan menjadi hambatan. Oleh karena itu mengacu pada hasil wawancara terhadap beberapa informan dan hasil observasi dapat kami uraikan beberapa hambatan yang seringkali ditemui di BKD provinsi Maluku yaitu:

1. Identifikasi sensor yang lambat
Mesin absensi memiliki batas kapasitas data sidik jari dan scan yang mempengaruhi sistem mesin. Semakin banyak data pindaian yang tersimpan di sistem, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengenali sidik jari.
2. Hang atau macet.
Mesin absensi hang atau crash karena banyak faktor. Hal ini biasanya disebabkan oleh banyak penyebab. Dimulai dengan kapasitas data pemindaian pegawai sudah penuh, dari masalah perangkat keras hingga masalah adaptor.
3. Tidak berhasil membaca sidik jari
Data pindaian pegawai tidak disimpan di perangkat karena sidik jari

pegawai tidak dapat diidentifikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi permukaan sensor yang mulai buram atau kotor. Atau, permukaan sensor tergores dan sidik jari tidak bisa terbaca. Biasa ini disebabkan karena kecerobohan dari para pegawai, ketika tergesa gesa untuk absen bisa saja aksesoris cincin tergores pada permukaan sensor.

4. Jam dan tanggal kadang tidak sesuai
Mungkin ada masalah dengan baterai CMOS. Bila ini terjadi, biasanya sangat merepotkan karena perlu diperbaiki di service center untuk mengganti baterai.
5. Tidak bisa terkoneksi dengan komputer
Hal ini biasanya disebabkan oleh koneksi jaringan yang terkadang tidak stabil dan dibutuhkan adanya pembaharuan.
- a. Upaya Pemerintah mengatasi kendala program absensi online.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi hambatan dan stabilitas berjalannya program absensi online ini adalah dengan:

1. Melapor pada pihak yang terkait
2. Pemerintah menghimbau agar langsung melaporkan kepada pihak

terkait yang ada di BKD agar dapat direkap datanya, jika ditemukan adanya kendala-kendala oleh para pegawai dalam sistem absensi online tersebut.

3. Observasi penyebab dan perbaikan. Pemerintah terkait terus mengawasi dan selalu mengadakan evaluasi terkait program tersebut, dan biasanya akan mencari tau apa penyebabnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan secepatnya agar program tersebut tidak stuck ditengah jalan.
4. Melakukan monitoring absensi secara berkala. Tidak hanya berhenti disitu saja, biasanya diadakan monitoring secara berkala untuk menganalisis data-data kehadiran pegawai dan ada perhatian khusus bagi pegawai yang tidak sempat absen karena kendala- kendala yang ditemukan seperti biasanya.
5. Insentif bagi pegawai dengan kehadiran penuh. Sekretaris BKD provinsi Maluku juga mengatakan bahwa mereka mendukung penuh adanya insentif lebih bagi pegawai dengan kehadiran penuh, hal ini dinilai sangat memberikan motivasi dan semangat bagi para pegawai untuk menjunjung tinggi nilai kedisiplinan.

KESIMPULAN

Mengacu pada kajian dalam penelitian tentang program sistem absensi online dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Badan Kepegawaian provinsi Maluku maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa penerapan sistem absensi online ini sudah berjalan cukup baik yang, sangat membantu dan memberikan kemudahan

bagi para pegawai kantor dalam mengabsen kehadiran mereka serta dapat meminimalisir kehilangan data absensi maupun manipulasi data.

2. Hambatan yang di hadapi oleh BKD provinsi Maluku adalah masalah internal dalam program tersebut seperti indentifikasi sensor yang lambat, hang atau macet, tidak berhasil membaca sidik jari, jam dan tanggal tidak sesuai dan terkadang tidak terkoneksi dengan komputer.
3. Upaya - upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menerapkan beberapa strategi yang dipandang efektif seperti adanya observasi penyebab dan perbaikan pada sistem yang bermasalah, adanya himbauan agar langsung melapor kepada pihak yang terkait, pemerintah terkait melakukan monitoring secara berkala, dan adanya insentif bagi pegawai dengan kehadiran penuh.

SARAN

Pada dasarnya hampir semua kegiatan berlangsung dengan baik, namun ada beberapa hal yang mesti tetap dilakukan demi menjaga program sistem absensi online ini terlaksana lebih baik lagi dan tetap berlanjut, yaitu: Supaya program sistem absensi berbasis online dapat di terapkan pada para pegawai secara optimal, maka

pentingnya untuk berpegang pada prosedur yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

R. Ageng Setiani, B. Mukti dan B. Wahyu, (2015). Aplikasi Monitoring Sistem Absensi Sidik Jari Sebagai Pendukung Biaya Pegawai Terpusat Dengan SAP, Jurnal CCIT. Tangerang, Vol.9 No.1, 2015.

H. Wahyu, W. Anita B., dan F. Recha (2016). Perancangan Video Profile Sebagai Media Promosi Dan Informasi Di SMK Avicena Rajeg Tangerang, Jurnal CERITA. Tangerang, Vol. 2 No. 1.

R. Sri, Y. Muhammad dan D. Sinta Puspita (2015) Perancangan Aplikasi Absensi Peserta Bimbingan Belajar Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Yii, Jurnal CCIT. Tangerang, Vol. 9 No.1.

Smart presence (2021) Penerapan Absensi Online untuk PNS 26 mei 2022
<https://smartpresence.id/blog/waktu-kehadiran/absensi-online-pns>.

Panji Rachmat Setiawan (2020) Aplikasi Absensi online berbasis android, 27 mei 2022,
<https://media.neliti.com/media/publications/209520-penerapan-absensi-elektronik-dalam-menin.docx>

B. Perundang- undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 Peraturan Daerah Prov. Maluku No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.